



**RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2018-2023**



**DISUSUN OLEH :
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA**

Alamat : Jln. Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) / Jln. G. Obos XI,
Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya
Email : kesbangpol@palangkaraya.go.id dan Website : kesbangpol.palangkaraya.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SOPD	5
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SOPD.....	5
2.2 Sumberdaya SOPD	13
2.3 Kinerja Pelayanan SOPD	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	16
BAB.III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...	17
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi SKPD	17
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	17
3.3 Telaah Renstra.....	19
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kewajiban Lingkungan Hidup Strategis.....	20
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	21
BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN	25
BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	27
BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	28
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
BAB. VIII. PENUTUP	42

KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, kasih dan kemurahan-Nya kepada kami semua khususnya kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Palangka Raya dalam menyelesaikan Renstra Tahun 2018-2023

Adapun maksud dari penyusunan Renstra ini untuk membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih didalam membangun program RPJMD, Visi dan Misi.

Akhir kata, kiranya Tuhan memberkati kita semua di segala tugas dan kerja.

Palangka Raya, Mei 2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Palangka Raya

Ir. JANUMINRO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19620713 198903 1009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persatuan dan kesatuan bangsa yang dimanipestasikan kedalam suatu wawasan nasional yaitu merupakan cara pandang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan latar belakang sejarah dan kondisi Sosial Budaya serta pemanfaatan konstelasi kekuatan masyarakat yang ada guna menciptakan dorongan dan rangsangan dalam usaha mencapai tujuan pembangunan mulai memudar setelah terjadinya berbagai perubahan system pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Didalam RENSTRA tersebut memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan SOPD.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya telah menyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya 2018-2023 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Palangka Raya, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP Kota Palangka Raya. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan program dan kegiatan yang akan disusun nantinya bisa terarah dan tepat sasaran sesuai dengan yang telah ditargetkan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

2. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Pasal 219) Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi- fungsi yang bersifat Strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Tahun 2018-2023 (lembar Nomor 2);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya 2018 - 2023 disusun dengan maksud menyediakan pedoman resmi bagi pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan memiliki maksud dan tujuan :

1.3.1 Maksud

Rencana strategis ini bermaksud untuk memberikan arah, pedoman dan landasan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan politik, pembinaan hubungan organisasi, dan kemasyarakatan sebagai penjabaran tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) selama 5 (lima) tahun kedepan.

1.3.2 Tujuan

Memperkuat konsistensi perencanaan dengan pemilihan program dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada;

Mewujudkan komitmen terhadap program yang disepakati dari kegiatan yang telah dibahas secara partisipatif dengan pihak-pihak yang terkait;

Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, kronomologi dan berkelanjutan secara sinergis;

Menjabarkan Visi, Misi, Agenda pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2023;

Menyediakan satu acuan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Pemerintah Kota Palangka Raya, APBN dan Sumber dana lainnya;

Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun; dan

Menciptakan iklim pemerintahan daerah berbasis kinerja yang aman, kondusif dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam menyusun Rencana Strategis ini adalah dengan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu antara lain pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan Rencana Strategis. Dalam melaksanakan tahapan-tahapan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya melakukan koordinasi baik internal maupun external dengan melibatkan berbagai pihak sehingga diharapkan data yang didapat nantinya merupakan data-data yang riil sesuai dengan kondisi sekarang dan yang akan datang. Setelah melalui semua tahapan diatas, maka Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Palangka Raya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I ***Pendahuluan*** Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.
- Bab II ***Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah*** Menguraikan peran tupoksi dan mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.
- Bab III ***Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah*** Menjabarkan identifikasi permasalahan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra, Telaahan RTRW dan KLHS dan Penentuan isu-isu strategis.
- Bab IV ***Tujuan Dan Sasaran*** Berisi tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Bab V ***Strategi dan Arah Kebijakan*** Berisi mengenai pernyataan Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.
- Bab VI ***Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif*** Menguraikan rencana program dan kegiatan dan pendanaan indikatif
- Bab VII ***Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*** Menguraikan secara ringkas indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang
- Bab VIII ***Penutup***

BAB II

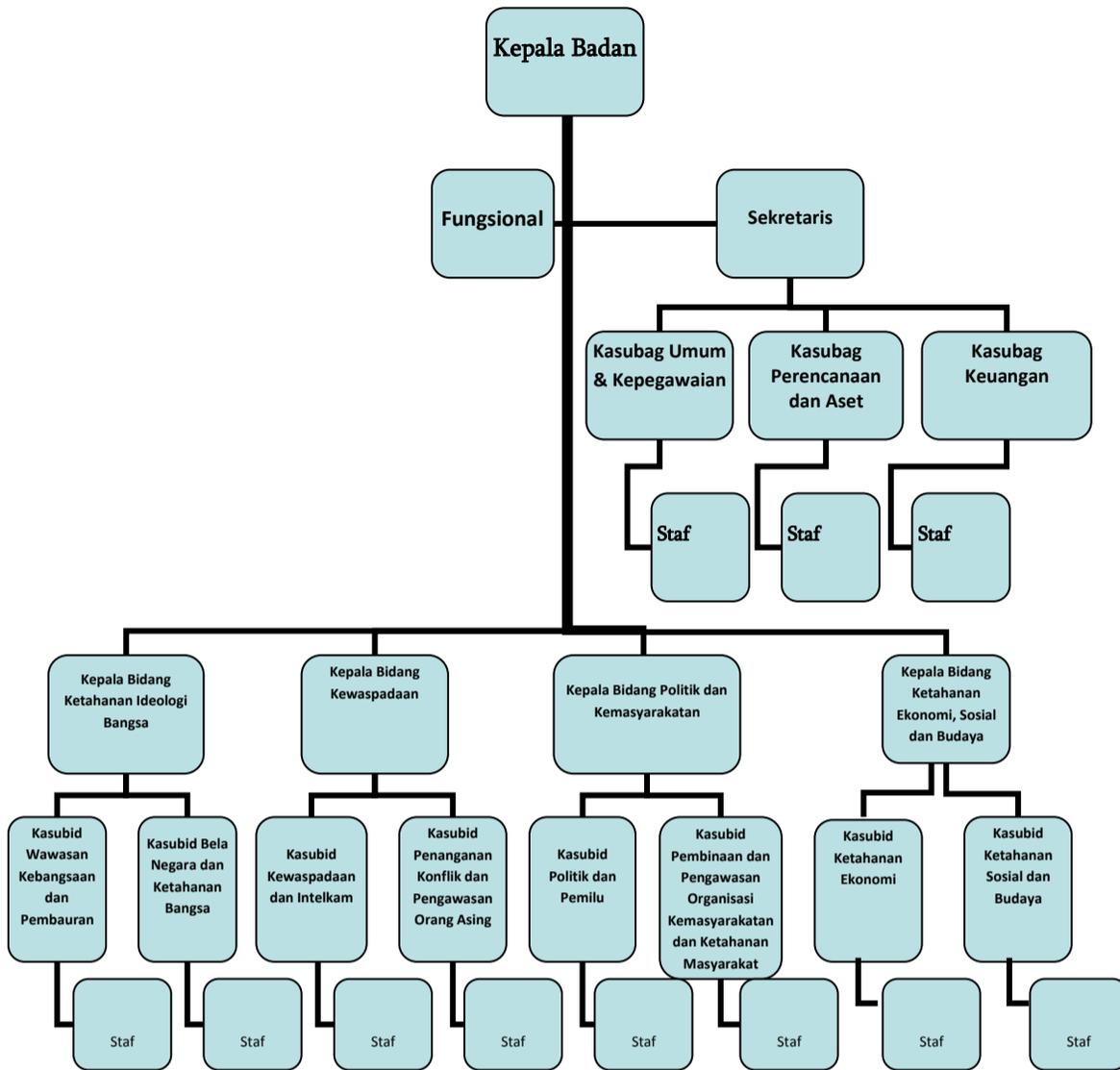
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA

2.1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Aset;
 - 3) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran;
 - 2) Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Bangsa.
4. Bidang Kewaspadaan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kewaspadaan dan Intelkam;
 - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing
5. Bidang Politik dan Kemasyarakatan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Politik dan Pemilu;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Ketahanan Masyarakat
6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA**



Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kota Palangka Raya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kota Palangka Raya mempunyai fungsi : Pembinaan teknis dan pengkoordinasian serta mediasi/fasilitasi, perumusan standar, norma pedoman, kriteria dan prosedur teknis serta pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan, pembauran, kewaspadaan nasional, fasilitas organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Uraian tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kota Palangka Raya sebagai berikut :

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan politik dan organisasi kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Merumuskan menetapkan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, mengatur dan memfasilitasi kegiatan di Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa;
- d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur dan memfasilitasi kegiatan di bidang Kewaspadaan ;
- e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur dan memfasilitasi kegiatan di bidang Politik dan Kemsayarakatan;
- f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur dan memfasilitasi kegiatan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- g. Mengendalikan pengelolaan Kesekretariatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi di lingkungan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi, yaitu :

- a. mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan oleh Bidang-Bidang di lingkungan Badan;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data ; dan
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan serta pelaporan ;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran ;
- e. menyusun program, mengoordinasikan dan mengevaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
- f. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
- g. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- h. menyusun program, membina , mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas Organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan Administrasi Keuangan ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Sekretariat terdiri dari :

- (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, urusan perlengkapan dan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, mengumpulkan bahan, melaksanakan pelayanan serta mengelola administratif kepegawaian;
- (b) Sub Bagian Perencanaan dan aset mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana kerja dan program kerja serta melakukan koordinasi intern tentang penyusunan program kerja Badan serta pelaporannya.
- (c) Sub Bagian Keuangan kapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan pertanggungjawaban anggaran serta mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan.

Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa

Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa mempunyai tugas pokok melakukan Pembinaan, fasilitasi di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok mempunyai fungsi, yaitu :

- a. menyusun program, mengadakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ;
- b. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan Ketahanan Ideologi, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan ;
- c. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan Wawasan Kebangsaan;
- d. menyusun program, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan Ideologi Bela negara, Pembauran bangsa, wawasan kebangsaan ;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa terdiri dari :

- (a) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran mempunyai tugas pokok melaksanakan mediasi, fasilitasi serta pengkajian masalah strategis daerah dalam upaya membina Wawasan Kebangsaan;
- (b) Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan mediasi, fasilitasi dan pembinaan Bela Negara ;

Bidang Politik dan Masyarakat

Bidang Politik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan politik masyarakat, pembinaan partai politik dan fasilitasi hubungan antar lembaga dalam penyelenggaraan Pemilu.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok mempunyai fungsi, yaitu :

- (a) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan hubungan politik, pemberdayaan politik masyarakat, dan fasilitasi Pemilihan Umum ;
- (b) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan hubungan dengan partai politik, lembaga politik, lembaga legislatif dan fasilitasi Pemilihan Umum ;
- (c) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan hubungan dengan partai politik, lembaga politik, lembaga legislatif dan fasilitasi Pemilihan Umum ;
- (d) menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi bimbingan dan petunjuk teknis hubungan dengan partai politik, lembaga politik, lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat ;
- (e) menyusun program, mengatur mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan petunjuk teknis hubungan dengan partai politik, lembaga politik, lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat ; dan;
- (f) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Bidang Politik dan Kemasyarakatan terdiri dari :

- (a) Sub Bidang Politik dan Pemilu mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pendidikan politik masyarakat dalam rangka pelaksanaan demokrasi penyelenggaraan Pemilu.
- (b) Sub Bidang pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan ketahanan masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat (Ormas), LSM, Yayasan dan Paguyuban dan nirlaba lainnya.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Penyelenggaraan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dalam rangka mewujudkan kerukunan dan Stabilitas ekonomi dalam masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok mempunyai fungsi, yaitu :

- (a) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi ;
- (b) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya ;
- (c) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan masalah sosial kemasyarakatan ;
- (d) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Ketahanan Sumber Daya Alam dan kesenjangan perekonomian, perdagangan investasi, fiskal dan moneter, lembaga usaha ekonomi dan perilaku ekonomi ; dan
- (e) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari :

- (a) Sub Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengawasan dalam rangka untuk mempertahankan seni dan budaya di masyarakat.
- (b) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan mengawasi perkembangan ekonomi dalam rangka menjaga pengembangan ekonomi masyarakat.

Bidang Kewaspadaan

Kepala Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Kewaspadaan dalam rangka mewujudkan kerukunan dan Stabilitas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok mempunyai fungsi, yaitu :

- (a) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini ;
- (b) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing ;
- (c) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan fasilitasi Penanganan konflik;
- (d) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama Intelijen Keamanan ;
- (e) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengavaluasi bimbingan dan petunjuk teknis, pelaksanaan Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing, Penanganan Konflik dan kerjasama Intelijen Keamanan ; dan
- (f) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Bidang Kewaspadaan terdiri dari :

- (a) Sub Bidang Penanganan Konflik dan pengawasan orang asing mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan kepada Orang asing dan Lembaga Asing dalam rangka menjaga keamanan di masyarakat.
- (b) Sub Bidang Kewaspadaan Dini & Intelkam mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan menangani konflik dalam rangka menjaga kerukunan dan keamanan dalam masyarakat.

Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

Jumlah Pegawai menurut golongan, eselon & pendidikan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 29 orang ASN dan 7 Orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kualifikasi SDM Berdasarkan :	2018
1.	Tingkat Pendidikan : <ul style="list-style-type: none">○ SMP○ SMU/ SMK○ D3○ D2○ S1○ S2	- 6 1 1 16 5
2	Jenis Kelamin : <ul style="list-style-type: none">○ Laki-laki○ Perempuan	19 10
3	Golongan : <ul style="list-style-type: none">○ IV○ III○ II	7 19 3
4	Pegawai Tidak Tetap	9

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Bagian ini berisi tentang tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya berdasarkan sasaran/ target Rencana Strategis yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Table T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bdan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Palangka Raya

No	Indikator kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2018					Realisasi Capaian Tahun 2014-2018					Rasio capaian pada Tahun 2014-2018				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Verifikasi dokumen bantuan keuangan Parpol				12	12	12	12	13	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2	Jumlah Ormas, LSM, dan OKP yang terdaftar/melapor				30	50	70	90	110	18	26	151	38	24	18	26	151	38	24
3	Rasio pertemuan/rapat Forum-forum				6	8	10	12	14	4	6	8	10	12	4	6	8	10	12
4	Rasio pertemuan/rapat Forkopimda				-	-	2	4	4	-	-	2	4	4	-	-	2	4	4
5	Tim penanganan terpadu dan Kominda kota Palangka Raya				4	4	6	8	10	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3

Tabel T-C.24

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke 2014-2018					Realisasi Anggaran pada Tahun ke 2014-1018					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke 2014-2018					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	2.413.0	2.978.0	3.044.2	2.666.2	2.869.0	2.245.2	2.684.4	2.714.8	2.514.0	2.683.5	93,05%	91,75%	94,29%	89,18%	93,54%	3.044.294.530,10	94,29%
Belanja Langsung	3.099.1	3.822.5	5.792.1	6.079.4	4.864.2	2.960.0	3.382.1	5.358.9	6.039.1	4.861.8	95,51%	88,48%	99,33%	92,52%	99,95%	5.792.171.060,50	99,33%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mendukung berlangsungnya upaya-upaya pembangunan disemua bidang dan prioritas-prioritas pembangunan yang mana salah satunya adalah pembangunan ekonomi kerakyatan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka akan dituntut suatu situasi dan kondisi lingkungan yang kondusif dan terkendali baik dari segi keamanan, ketertiban, ketentraman karena kondisi yang kondusif dan terkendali yang merupakan prasyarat utama yang didukung oleh masyarakat yang mandiri, sadar, demokratis, berwawasan kebangsaan dan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan.

Dari gambaran diatas maka dapat diambil beberapa asumsi sebagai tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, sebagai berikut :

1. Selaku instansi/ organisasi yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang koordinasi dan fasilitasi pembinaan demokratisasi dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan; pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat; serta pembinaan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi lainnya.
2. Sebagai fasilitasi diaspek sosial kemasyarakatan yang heterogen, membina hubungan sinergis dengan instansi vertikal, horisontal dan terkait;
3. Adanya momentum penyelenggaraan Pemilu Legislatif/ Presiden dan Pilkada yang memicu dinamisnya pergerakan politik di masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan berdasarkan pada tupoksi dan tugasnya yang mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagai salah satu instansi yang mendukung terciptanya dan terjaganya ketertiban dan ketentraman diwilayah Kota Palangka Raya dengan berpedoman pada analisis isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD kota maka dapat terlihat permasalahan-permasalahan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya dalam pencapaian kinerja pada perencanaan strategis dan program umum pembangunan secara garis besar adalah :

1. Kurangnya pemahaman dan pengamalan paham kebangsaan
2. Kurangnya pemahaman arti pentingnya koordinasi
3. kurang terdeteksinya situasi dan kondisi daerah
4. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang politik

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kurangnya pemahaman dan pengamalan paham kebangsaan	kurangnya kualitas pemahaman dan pelaksanaan paham kebangsaan dalam keanekaragaman budaya, suku, ras dan agama	Kurangnya kesadaran wawasan kebangsaan
		kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik	kurangnya kualitas pendidikan politik masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penetapan visi dan misi kota yang berdasarkan pada kondisi, gambaran umum daerah maupun kebijakan pengembangan pembangunan kota visi dan misi RPJM Daerah adalah untuk menjembatani kondisi masa kini dengan kondisi masa depan,

mengklarifikasi arah dan tujuan suatu organisasi serta menumbuhkan inspirasi dan tantangan pembangunan.

Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang merupakan tahapan ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028. Visi dan misi, tujuan sasaran RPJMD disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Berdasarkan hal diatas visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 telah dirumuskan sebagai berikut :

VISI PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA 2018-2023



Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, dan Sejahtera Untuk Semua

Untuk mewujudkan visi Kota Palangka Raya tahun 2018 - 2023 tersebut maka dijabarkan dalam 3 (Tiga) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Palangka Raya sebagai berikut :

MISI PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA 2018 – 2023



MISI PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA 2018 – 2023

1. Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)
2. Mewujudkan kerukunan seluruh elemen Smart Society (Masyarakat cerdas)
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota dan masyarakat daerah pinggiran (Ekonomi cerdas)

Berpedoman pada RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dengan sudah ditetapkannya visi dan misi Kota Palangka Raya seperti uraian diatas sebagai landasan dalam pembangunan Kota Palangka Raya dalam mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut yang sesuai pada bidang tupoksinya maka Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya menempati posisi pada misi kota yang kedua yaitu :

MISI 2
Mawujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat
Smart Society (Masyarakat cerdas)

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kalimantan Tengah

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian/ L

Kementerian Dalam Negeri Sebagai Poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri atau titik keseimbangan dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif.

3.3.2. Telaahan Renstra SKPD Provinsi

Telaahan Renstra Provinsi Kalimantan Tengah dimaksud untuk menilai keserasian, keterpaduan, Sinkronisasi, baik sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SOPD provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Kabupaten/ Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing- masing SOPD.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu SOPD yang dibentuk untuk mendukung program- program gubernur dalam bidangnya, berusaha untuk tampil dan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi bersama- sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Kabupaten/Kota, maka untuk mewujudkan tujuan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mampu menjembatani, menjaga kesinambungan, mensinergiskan dan mensinkronkan perencanaan antar waktu, antar aparatur maupun antar wilayah kabupaten/ kota se Provinsi Kalimantan Tengah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dengan adanya isu-isu strategis yang terangkum dari sasaran jangka menengah RPJMD yang menjadi pedoman dasar dalam telaahan rencana strategis yang tertuang pada fakta dan permasalahan RPJMD sebagai prioritas agenda perubahan yaitu pada politik, pemerintah dan hukum dimana hal ini dapat diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagai telaahan rencana srategis yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4

Hasil Telaahan terhadap RPJMD Kota

NO	TELAAHAN STRATEGIS	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	Keharmonisan hubungan lembaga eksekutif dan legeslatif daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinamisnya gerakan politik ➤ Momentum pemilu 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum berfungsi secara optimal
2	Belum sinerginya sasaran, progam dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rencana kerja berdasarkan sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurang sinkron dengan SKPD terkait
3	Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan kepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terjadinya demo/ unjuk rasa ➤ Karakteristik masyarakat yang homogen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reformasi yang disalah artikan ➤ Kurang berfungsinya sebagai fasilitator
4	Penegakan Perda belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kerjasama dengan Forkopimda 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih kurang sinergis

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengidentifikasian faktor penghambat dan pendorong pada telaahan RTRW dan KLHS ini berdasarkan pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan diselaraskan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dengan asumsi karena pelaksanaan kegiatan tidak dibidang pembangunan infrastuktur (fisik) tetapi dibidang sosial kemasyarakatan (non-fisik) yang mana hendaknya permasalahan-permasalahan yang ada dapat ditindak-lanjuti dengan mengambil kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 5

Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

NO	Jenis Kegiatan SKPD yang terkait dengan RTRW dan KLHS	Kesesuaian dengan RTRW & KLHS	
		YA	TIDAK
1	Meningkatkan hubungan koordinasi yang sinergis dengan instansi terkait baik itu vertikal maupun horisontal	YA	
2	Memberikan pelatihan/sosialisasi kepada masyarakat bagaimana mendeteksi secara dini keamanan di lingkungan masing- masing	YA	
3	Termonitornya/ terpantaunya keadaan situasi dan kondisi daerah	YA	
4	Dapat merangkul dan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan	YA	
5	Hubungan yang sinergis antara organisasi-organisasi politik	YA	
6	Pembinaan pada partai politik yang mendapat kursi/suara di DPRD	YA	
7	Momentum Pemilu PILPRES/LEGISLATIF-KADA tahun 2019	YA	
8	Fasilitator dalam menyikapi gejala/ potensi yang dianggap akan mengganggu keamanan dan ketertiban	YA	
9	Terlaksananya program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan perjanjian kinerja	YA	

Suatu kondisi kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dan dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Telaahan ini bertujuan untuk menciptakan tata ruang yang nyaman, aman, produktif, berkeadilan berwawasan lingkungan dan menarik dalam mendukung kemajuan kegiatan sosial, budaya dalam menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang wilayah dapat dirincikan sebagai Peningkatan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Perkotaan yang memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku sehingga terjadi rasa aman dan nyaman.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan dengan pengidentifikasian permasalahan, telaahaan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 maka untuk menentukan penentuan isu-isu startegis oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

Palangka Raya menggunakan analisis SWOT sebagai upaya dalam menentukan faktor-faktor mana yang menjadi faktor peluang-tantangan atau faktor kekuatan-kelemahan untuk mengatasi kendala yang ada dalam pencapaian target sasaran pencapaian visi dan misi kota.

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi (instansi) yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merencanakan strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threaths*).

1. Kekuatan (Strenght)

- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Poltik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara penghitungan, penganggaran dana anggaran pendapatan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

2. Kelemahan (Weakness)

- Masih perlunya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (Aparatur) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya;

- Terbatasnya penyediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan secara berkesinambungan;
- Minimnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

3. Peluang (Opportunity)

- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak berorganisasi dan berpolitik melalui Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan maupun Partai Politik;
- Tekad Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mewujudkan "Good Governance" dan "Clean Government" serta memenuhi tuntutan masyarakat terhadap penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta pelayanan prima dari pemerintah kota terhadap kepentingan masyarakat banyak.

4. Tantangan (Threats)

- Kondisi masyarakat yang masih rawan terhadap konflik
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup berbangsa dan bernegara;
- Masih adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah;

Penganalisaan dengan SWOT dalam hal ini adalah untuk menilai faktor-faktor yang dimiliki dimana faktor yang menjadi keunggulan harus dioptimalkan pelaksanaannya sedangkan faktor yang menjadi kelemahan harus dapat dijadikan sebagai acuan agar lebih berfungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tupoksinya.

Isu-isu Strategi dari Hasil Analisis

Strategi S-O (Comparative Advantage)

1. Saling mendukung antara Pemerintah Kota dengan Partai-partai Politik untuk menangkap peluang penyelenggaraan Pemilu Legislatif/ Presiden dan Pilkada yang selalu memicu dinamisnya pergerakan politik.
2. Banyaknya keberadaan organisasi-organisasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat baik itu secara swadaya atau berkoordinasi

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

dengan pemerintah dengan berlandaskan pada kesadaran dan berbangsa dalam wadah kesatuan negara Republik Indonesia yang ditunjang adanya pendidikan NKRI yang sudah dimulai dan ditanamkan sejak usia dini.

3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal, horisontal dan terkait, melakukan monitoring dan evaluasi Ipoleksosbud untuk menangkap peluang tidak bisa diprediksinya, untuk mengimbangi makin meningkatnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya. Tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya adalah **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategis SOPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagai berikut :

1. Meningkatnya kerukunan seluruh elemen masyarakat

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya yang dijabarkan dari misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Tabel 41.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan RPJMD Kota Palangka Raya

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kerukunan masyarakat	Angka Kriminalitas yang tertangani	5.90	5.80	5.75	5.60	5.55

Tabel 42.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Indeks toleransi	16	43	10	10	10

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, Dan Sejahtera Untuk Semua		
MISI II	Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat Smart Society (masyarakat cerdas)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien	Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketahanan masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, komunikasi, keamanan dan pelayanan publik	Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat kota Palangka Raya

Tabel T-C.26 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Untuk mencapai tujuan **Mewujudkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Yang Efektif dan Efisien** dan sasaran I dilakukan dengan **strategi** : Peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, komunikasi, keamanan dan pelayanan publik **Arah kebijakan** : Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Palangka Raya.

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Melalui analisa dan telaah yang telah dilakukan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya telah menentukan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk 5 (lima) tahun yang akan datang yang tentunya akan menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

a. Program

Dalam rangka implementasi kebijaksanaan yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka disusun program sesuai dengan program-program pada draft penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

a. Program pada Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah tertuang dalam RKPD yaitu :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
6. Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat

b. Kegiatan

Secara lebih rinci dalam kaitannya dengan pelaksanaan dari program yang telah ditetapkan pada Tahun 2019, maka langkah dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Penyediaan jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan
 8. Penyediaan makanan dan minuman
 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
 11. Penyediaan jasa event palangka fair
 12. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 13. Pengadaan peralatan gedung kantor
 14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 16. Penyusunan pelaporan keuangan
 17. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 18. Penyusunan rencana dan kegiatan
 19. KOMINDA Kota Palangka Raya
 20. Kegiatan Tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri tingkat kota palangka raya
 21. Kegiatan forum kerukunan dalam kehidupan umatberagama (FKUB)
 22. Ikrar anak bangsa
 23. Pembauran Kebangsaan
 24. Forum Bela Negara
 25. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
 26. Tim verifikasi kelengkapan administrasi partai politik di wilayah Kota Palangka Raya
 27. Dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu Kepala daerah,legislativ dan pemilihan presiden
- c. Program yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Palangka Raya pada Tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut :
1. Program
 1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
 2. Program Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan
 3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional
 4. Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi
 5. Program Peningkatan Pendidikan Politik

2. Kegiatan

1. Penyediaan jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
11. Penyediaan jasa event palangka fair
12. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
13. Pengadaan peralatan gedung kantor
14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
16. Pengadaan pakai dinas
17. Penyusunan pelaporan keuangan
18. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
19. Penyusunan rencana dan kegiatan
20. Dukungan Kegiatan Pembauran Kebangsaan
21. Dukungan Penguatan Wawasan Kebangsaan
23. Dukungan Kegiatan Mitra Bela Negara
24. Dukungan Kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa
25. Dukungan Terpadu Pencegahan Konflik Sosial Diwilayah Kota Palangka Raya
26. Dukungan Kegiatan Kewaspadaan Dini daerah Kota Palangka Raya
27. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
28. Pembinaan Ketahanan Ekonomi Dalam Kerangka Ketahanan Nasional
29. Dukungan Kegiatan Kerukunan Umat Beragama Kota Palangka Raya.
30. Dukungan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan peredaran gelap narkoba dan percursor narkoba
31. Dukungan penguatan kelembagaan dan penggunaan bantuan parpol

32. Dukungan kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah/ Legislative dan Presiden
33. Penguatan Kelembagaan bagi Ormas, OKP, Masyarakat/ Kelompok Penguatan Kelembagaan dan Pengurusan Masyarakat dan Nirlaba Lainnya.

Rencana Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018-2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

Tujuan	Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Kondisi awal renstra	Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya toleransi dikalangan masyarakat	I. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100	1.016.671.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan listrik dan telepon kantor		100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium penatausahaan keuangan dan PTT		100	345.389.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor		100	16.069.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya bahan dan alat tulis kantor		100	82.455.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Mendukung kelancaran administrasi kantor		100	54.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya sarana dan penerangan kantor		100	22.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya informasi layanan masyarakat		100	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai, tamu dan masyarakat		100	32.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rakor, bimtek, konsultasi dan study banding		100	187.681.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah		100	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penyediaan jasa palangka raya fair	Terlaksananya pekan promosi budaya daerah		100	100.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur		100	391.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya umubul-umbul, bendera dan tiang bendera		100	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya kinerja pegawai dengan peralatan gedung kantor		100	158.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			yang memadai													
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya dana untuk pemeliharaan gedung kantor		100	55.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		100	102.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor yang memadai		100	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian kerja ASN dan PTT			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah		100	32.623.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan pelaporan keuangan	Tersedianya dokumen dan laporan keuangan		100	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi keuangan		100	13.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan rencana dan kegiatan	Tersedianya dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA		100	13.273.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya tingkat keamanan dan kenyamanan di wilayah Kota palangka Raya			622.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kominda Kota Palangka Raya	Terlaksananya koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah daerah		4	344.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri tingkat Kota Palangka Raya	Tersusunnya laporan pertriwulan penanganan konflik sosia;		4	277.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan	Tercapainya ketahanan ideologi pancasila dan pemahaman wawasan kebangsaan			1.226.420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Kegiatan Forum Umat Beragama (FKUB) Kota Palangka Raya	Terlaksananya kegiatan FKUB		4	241.419.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ikrar Anak Bangsa	Terlaksananya kegiatan ikrar anak bangsa		70	167.719.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya pembauran kebangsaan Kota Palangka Raya		8	774.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Forum Bela Negara	Terlaksananya bela negara bagi pengurus FBN, Mahasiswa, Siswa dan masyarakat		1	124.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tercapainya tingkat pemahaman politik masyarakat			580.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Forum koordinasi pimpinan daerah	Terlaksananya agenda rapat Forum Koordinasi Pimpinan daerah		4	972.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tim verifikasi kelengkapan administrasi parpol di wilayah kota Palangka Raya	Tertibnya kelengkapan administrasi parpol		1	45.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah, Legislatif dan Presiden	Terlaksananya kelancaran pemilihan presiden, wakil presiden dan legislatif		1	261.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Peningkatan Pelanayan Pemerintah			-	-	100	1.270.000.000	100	1.410.000.000	100	1.595.000.000	100	1.725.000.000	100	7.016.671.200
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan listrik dan telepon kantor		-	-	100	150.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium penatausahaan keuangan dan PTT		-	-	100	400.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	2.245.389.750
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor		-	-	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	96.069.800
		Penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya bahan dan alat tulis kantor		-	-	100	90.000.000	100	90.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	452.455.650

		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Mendukung kelancaran administrasi kantor		-	-	100	60.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	324.275.000
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya sarana dan penerangan kantor		-	-	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	142.800.000
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya informasi layanan masyarakat		-	-	100	60.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	325.000.000
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai, tamu dan masyarakat		-	-	100	50.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	90.000.000	100	322.125.000
		Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rakor, bimtek, konsultasi dan study banding		-	-	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	1.487.681.000
		Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah		-	-	100	50.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	280.000.000
		Penyediaan jasa palangka raya fair	Terlaksananya pekan promosi budaya daerah		-	-	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	540.875.000
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya umubul-umbul, bendera dan tiang bendera		-	-	100	425.000.000	100	495.000.000	100	495.000.000	100	495.000.000	100	2.301.520.000
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya kinerja pegawai dengan peralatan gedung kantor yang memadai		-	-	100	45.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	270.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya dana untuk pemeliharaan gedung kantor		-	-	100	160.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	918.500.000
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		-	-	100	60.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	310.500.000
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor yang memadai		-	-	100	110.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	572.520.000
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian kerja ASN dan PTT		-	-	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	230.000.000

		Penyusunan pelaporan keuangan	Tersedianya dokumen dan laporan keuangan		-	-	100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	540.000.000
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi keuangan		-	-	100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	540.000.000
		Penyusunan rencana dan kegiatan	Tersedianya dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA		-	-	100	41.000.000	100	60.000.000	100	75.000.000	100	85.000.000	100	293.623.750
		Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan	Tercapainya ketahanan ideologi pancasila dan pemahaman wawasan kebangsaan				2340	1.590.000.000	2850	1.900.000.000	3360	1.960.000.000	3880	2.020.000.000	15001	7.470.000.000
		1. Dukungan Kegiatan pembauran Kebangsaan	Penguatan kelembagaan dan sosialisasi				2000	1.250.000.000	2500	1.500.000.000	3000	1.500.000.000	3500	1.500.000.000	12500	5.750.000.000
		2. Dukungan Penguatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya kegiatan penguatan wawasan kebangsaan				210	100.000.000	210	110.000.000	210	120.000.000	210	130.000.000	1050	460.000.000
		3. Dukungan Penguatan Kegiatan Mitra Bela Negara	Sosialisasi kegiatan bela negara				60	150.000.000	70	200.000.000	80	250.000.000	100	300.000.000	360	900.000.000
		4. Dukungan kegiatan ikrar anak bangsa	Terlaksananya kegiatan ikrar anak bangsa				70	90.000.000	70	90.000.000	70	90.000.000	70	90.000.000	350	360.000.000
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Terciptanya Keamanan dan kenyamanan di Wilayah Kota Palangka Raya				151	1.440.000.000	158	1.550.000.000	165	1.700.000.000	172	1.850.000.000	741	6.540.000.000
		1. Dukungan Terpadu Pencegahan konflik Sosial di wilayah Kota Palangka Raya	Capaian kinerja pemulihan pasca konflik				94	350.000.000	96	360.000.000	97	380.000.000	99	400.000.000	99	1.490.000.000
		2. Dukungan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah Kota Palangka Raya	Terciptanya Keamanan dan kenyamanan di Wilayah Kota Palangka Raya				30	300.000.000	35	350.000.000	40	370.000.000	45	400.000.000	50	1.420.000.000
		3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi				22	1.100.000.000	24	1.150.000.000	26	1.200.000.000	18	1.250.000.000	120	4.700.000.000
		Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya pemahaman mengenai peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi				53	640.000.000	57	750.000.000	62	900.000.000	67	1.050.000.000	239	3.340.000.000

		1. Pembinaan ketahanan ekonomi dalam kerangka ketahanan nasional	Pendataan potensi dalam rangka mendukung ekonomi, sosial dan budaya				7	180.000.000	7	200.000.000	7	250.000.000	7	300.000.000	35	930.000.000
		2. Dukungan kegiatan kerukunan umat beragama Kota Palangka Raya	Pertemuan terkait peningkatan kerukunan antar umat beragama				46	160.000.000	50	200.000.000	55	250.000.000	60	300.000.000	211	910.000.000
		3. Dukungan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Terciptanya Kota Palangka Raya bebas dari peredaran dan prekursor narkotika				40	300.000.000	30	350.000.000	25	400.000.000	20	450.000.000	10	1.500.000.000
		Peningkatan Pendidikan Politik	Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP serta meningkatnya partisipasi pemilih mengikuti Pemilu				82	670.000.000	92	220.000.000	102	280.000.000	190	1.330.000.000	611	2.500.000.000
		1. Dukungan penguatan kelembagaan dan penggunaan bantuan parpol	Verifikasi berkas permohonan bantuan keuangan kepada partai politik				12	90.000.000	12	120.000.000	12	150.000.000	12	170.000.000	12	530.000.000
		2. Dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu kepala daerah/legislatif/presiden	Sosialisasi dukungan kelancaran pelaksanaan pemilu serentak legislatif/presiden dan kepala daerah				73	500.000.000	-	-	-	-	75	1.000.000.000	75	1.500.000.000
		3. Penguatan kelembagaan bagi ormas, OKP, masyarakat/keompok masyarakat dan nirlaba lainnya	Rekomendasi penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT)				30	80.000.000	40	100.000.000	50	130.000.000	60	160.000.000	200	470.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

6.1 Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran

RENSTRA

Pada bab ini telah dirumuskan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RENSTRA dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagai komitmen dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam mendukung RENSTRA .

INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN RPJMD 2018 -2023

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Program
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
1	Dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya	0	30	35	40	45	50	200	Peningkatan Kewaspadaan Nasional
2	Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	8	20	30	40	50	60	200	Peningkatan Pendidikan Politik
3	Jumlah pertemuan terkait kerukunan umat beragama		46	46	50	55	60	257	Peningkatan ketahanan social dan ekonomi
4	Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan		92%	94%	96%	97%	99%	99%	Peningkatan Kewaspadaan Nasional
5	Tingkat partisipasi pemilih	66%	70%	73%	-	-	75%	75%	Peningkatan Pendidikan Politik
6	Indeks Toleransi	16	43	10	10	10	10	10	Pembinaan ideologi wawasan kebangsaan

BAB. VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 berisikan rencana yang bersifat acuan dasar dan merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Renstra Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam menghadapi kondisi masyarakat dinamis dan berbagai perkembangan/perubahan guna diarahkan pada semakin terkendalinya suasana kondusif serta semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dalam rangka penyusunan rencana operasional yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Skala prioritas pembangunan masyarakat, Kesatuan Bangsa/Politik
2. Penyediaan Biaya/Alokasi Dana yang relatif mencukupi
3. Kredibilitas pengawasan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 ini merupakan konsekuensi dambaan atas keberhasilan dalam lima tahun kedepan, namun sangat ditentukan dari dukungan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan untuk mencapai visi dan Misi Organisasi.